



Pentingnya Opini Audit sebagai Pemediasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

Dendy Indramawan*, Antonius Beni Handayanto, Atik Djajanti

Fakultas Sekolah Pascasarjana Perbanas Institute, Gd. Perbanas Unit VI Lantai 7, Jl. Perbanas Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, Indonesia

¹dendy.indramawan503@perbanas.id * ²bhandayanto@yahoo.com ³atik@perbanas.id

*corresponding author

doi.org/10.33795/jraam.v5i2.007

Informasi Artikel

Tanggal masuk : 21-8-2020
Tanggal revisi : 02-09-2021
Tanggal diterima : 03-09-2021

Keywords:

*Audit Opinion;
Government Financial Performance;
Human Development Index.*

Abstract

This study examines the mediating effect of audit opinion on the relationship between local government financial performance and the Human Development Index (HDI) by implementing path analysis. The results showed that audit opinion does not mediate the relationship between Local Own-Source Revenue (PAD) effectiveness and HDI. Audit opinion partially mediates the influence of Regional Financial Independence on HDI, while it perfectly mediates the relationship between Activity Ratio and HDI. This indicates that local government financial performance must be followed by accountable management to accelerate HDI.

Kata kunci:

*Indeks Pembangunan Manusia;
Kinerja Keuangan Pemerintah;
Opini Audit.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efek mediasi opini audit pada hubungan kinerja keuangan pemerintah daerah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Opini Audit tidak memediasi hubungan antara Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan IPM. Opini audit memediasi parsial pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap IPM. Opini audit memediasi sempurna hubungan Rasio Aktivitas dan IPM. Ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah harus diikuti dengan pengelolaannya secara akuntabel, sehingga dapat mempercepat peningkatan IPM.



1. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan desentralisasi fiskal sejak 2001. Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan wewenang dan hak pemerintah daerah dalam rangka menciptakan efisiensi serta efektivitas dalam penyediaan barang maupun jasa yang

menjadi kebutuhan masyarakat [1]. Ini diharapkan akan mendorong percepatan pembangunan daerah khususnya kawasan tertinggal.

Proksi yang sering digunakan sebagai tolak ukur kesuksesan pembangunan daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

[2]. IPM merepresentasikan kinerja pembangunan manusia dengan memperhatikan tiga faktor utama pada aspek usia lebih lama ditunjang fasilitas kesehatan yang mumpuni, peningkatan pengetahuan dengan sarana pendidikan yang memadai, dan taraf hidup layak melalui pemerataan ekonomi [3]. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pencapaian IPM antar daerah dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori yaitu IPM rendah (dibawah 60), IPM sedang (antara 60 dan 70), IPM tinggi (antara 70 dan 80), dan IPM sangat tinggi (lebih dari 80). IPM Indonesia telah lompat dari kategori sedang ke kategori tinggi pada 2016. Di 2019, IPM Indonesia adalah 71,92 [4]. Meskipun demikian, masih banyak daerah-daerah yang memiliki IPM jauh dibawah pencapaian IPM nasional. Tugas pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperkecil disparitas IPM antar daerah, sehingga tercapai pemerataan pembangunan manusia di Indonesia.

Peningkatan IPM suatu daerah tidak terlepas dari kinerja keuangan pemerintah daerah [5]. Hubungan ini dapat dijelaskan dengan teori federalisme fiskal. Teori ini menggambarkan pengaruh desentralisasi terhadap ekonomi, pelayanan kepada masyarakat, dan peningkatan kemakmuran [2]. Federalisme fiskal, pemerintah daerah memperoleh wewenang untuk menjalankan otonomi daerah dalam bentuk transfer anggaran pemerintah pusat kepada pemerintah daerah [6]. Teori federalisme fiskal memiliki hubungan dengan desentralisasi fiskal karena adanya kesamaan pola antara negara federal dan negara kesatuan [7]. Implementasi desentralisasi fiskal dipercaya mendorong efisiensi ekonomi karena anggaran pemerintah daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan setiap daerah, sehingga akan berimplikasi pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan dengan mekanisme sentralisasi [8]. Semangat utama dari pemberian wewenang tersebut yaitu memperkuat prinsip untuk pemberdayaan

pemerintah daerah, dengan pertimbangan bahwa pemerintah daerah tentunya lebih mengerti kebutuhan masyarakatnya dibandingkan pemerintah pusat.

Rasio keuangan menjadi salah satu proksi kinerja pemerintah daerah [9]. Rasio keuangan pemerintah daerah antara lain Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan Rasio Aktivitas.

Efektivitas PAD merepresentasikan apakah daerah mampu untuk merealisasikan pendapatan atas target penerimaan pada PAD [9]. Rasio ini mengukur kapabilitas pemerintah daerah untuk mencapai target PAD. Rasio ini dikategorikan sangat efektif (melampaui 100%), efektif (100%), cukup efektif (antara 99% dan 75%), dan tidak efektif (kurang dari 75%).

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah merupakan rasio yang mengukur seberapa independen suatu daerah. Rasio kemandirian ini juga dapat dijadikan tolok ukur seberapa besar partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di daerahnya. Diterapkannya desentralisasi fiskal lebih memacu pemerintah daerah agar menurunkan dependensi kepada pemerintah pusat ataupun provinsi. Untuk mengalkulasi rasio ini, realisasi PAD dikomparasikan dengan total pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman yang dilakukan oleh daerah [9]. Menurut Tim Litbag Depdagri Fisipol UGM dalam [10], Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dibagi menjadi 5 kategori yaitu sangat baik (lebih dari 50%), baik (antara 50% dan 40%), cukup (antara 40% dan 30%), sedang (antara 30% dan 20%), kurang (antara 20% dan 10%), dan sangat kurang (dibawah 10%).

Rasio Aktivitas adalah rasio yang menunjukkan bagaimana prioritas pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana pada belanja rutin dan belanja pembangunan dengan optimal [10]. Perhitungannya menggunakan perbandingan antara belanja pembangunan terhadap total rencana keuangan tahunan pemerintah daerah atau

yang dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga semakin naik rasio ini menunjukkan bahwa alokasi belanja pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas bagi masyarakat semakin besar. Belum terdapat klasifikasi pengukuran Rasio Aktivitas karena kebutuhan investasi pembangunan sangat dinamis di setiap daerah, tetapi rasio ini harus ditingkatkan untuk mencapai target pembangunan daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk menilai kelayakan dan kewajarannya. BPK akan memberikan 4 opini audit antara lain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) termasuk WTP-DPP (Dengan Paragraf Penjelas) atau *Unqualified Opinion*, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *Qualified Opinion*, Tidak Wajar (TW) atau *Adverse Opinion*, dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau *Disclaimer Opinion*. Dasar utama yang digunakan oleh BPK didalam pemberian opini atas LKPD yaitu apakah telah disusun berbasis pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta disajikan secara wajar untuk masing-masing pos atau akun [11].

Penelitian [12-15] menganalisis hubungan antara kinerja keuangan dan IPM di tingkat kabupaten dan kota di Indonesia. Penelitian [15] juga menunjukkan terdapat pengaruh Performa Keuangan Pemerintah Daerah terhadap opini audit yang dilakukan BPK.

Terdapat masalah IPM pada tingkat daerah. Meskipun IPM Indonesia telah masuk kategori tinggi, tetapi IPM pada level daerah tidak merata dan masih banyak daerah-daerah dengan IPM dibawah angka nasional. Padahal, otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal diharapkan mampu mendorong performa daerah, sehingga dapat mempercepat peningkatan IPM. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang semakin bagus dan akuntabel diharapkan dapat melayani masyarakat lebih baik juga, yang berkelanjutan pada meningkatnya kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab

itu, penelitian ini menganalisis hubungan langsung antara Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap IPM.

Penelitian ini juga membuat kerangka penelitian baru dengan menambahkan Opini Audit sebagai variabel mediasi, sehingga dapat diketahui pengaruh tidak langsung Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap IPM melalui Opini Audit menggunakan analisis jalur. Hal ini dikarenakan kesejahteraan masyarakat dengan salah satu indikatornya yaitu IPM juga dipengaruhi oleh pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang baik yang tercermin dari opini BPK [16].

Di era otonomi daerah, proses audit oleh BPK sangat krusial untuk melakukan asesmen tingkat kewajaran LKPD yang berupa opini, kesimpulan, serta rekomendasi [17]. Auditor berperan penting dalam temuan audit seperti kesesuaian antara penyusunan laporan keuangan terhadap ketentuan hukum, pengendalian internal, serta ketaatan pada prinsip transparansi melalui pengungkapan lengkap atas laporan keuangan (full disclosure). Hasil temuan akan menjadi pertimbangan BPK untuk menentukan tingkat kewajaran informasi melalui opini audit [18]. Alhasil, opini audit dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan pertanggungjawaban yang mencerminkan kinerja pemerintah daerah [19].

Penelitian terdahulu menganalisis data kabupaten dan kota dalam lingkup provinsi atau regional yang sama dimana tingkat variasinya cenderung rendah, sedangkan penelitian ini akan menganalisis data dari berbagai kabupaten dan kota di Indonesia dengan karakteristik yang lebih beragam.

2. Metode

Objek penelitian yaitu kabupaten dan kota di Indonesia. Penelitian ini berjenis kuantitatif dan termasuk dalam kelompok *confirmatory research*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah suatu teori didukung oleh fakta [20]. Riset ini menganalisis hubungan antar variabel

menggunakan kerangka penelitian berdasarkan teori federalisme fiskal.

Pengumpulan data menggunakan metode *random sampling* yang merupakan sebuah teknik untuk mendapatkan sampel secara acak. Dalam penelitian yang diketahui jumlah populasi, ukuran sampel dapat ditentukan menggunakan rumus Yamane [21]. Berikut merupakan Rumus Yamane :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

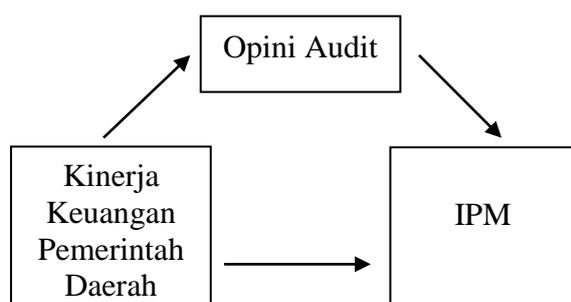
n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Ambang batas galat

Total populasi dalam penelitian yaitu 514 yang merupakan jumlah seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Apabila dirinci, maka Indonesia memiliki 98 kota dan 416 kabupaten. Menggunakan rumus Yamane dengan batas toleransi kesalahan 10% ditemukan jumlah minimal sampel yaitu 84 kabupaten dan kota. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 100 kabupaten dan kota dalam 5 tahun.

Teknik analisis dalam studi ini adalah analisis jalur. Teknik ini menganalisis pengaruh sebab akibat dalam regresi dimana variabel independen dapat memberikan efek langsung dan tidak langsung terhadap variabel dependen [22]. Data dalam penelitian berjenis sekunder dimana LKPD diambil dari situs web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPk), opini audit diambil dari *website* BPK, dan IPM diambil dari *website* BPS. Dibawah ini merupakan kerangka penelitian:



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian diatas menunjukkan bahwa penelitian ini akan menganalisis pengaruh langsung Kinerja Keuangan Pemerintah terhadap IPM dan hubungan secara tidak langsung Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan IPM melalui Opini Audit sebagai variabel mediasi.

Untuk menguji variabel mediasi, penelitian ini menggunakan metode *Product of Coefficient* dari Sobel. Langkah-langkah metode ini dilakukan melalui tahapan yang dimulai dari regresi antara Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel prediktor dengan Opini Audit sebagai variabel yang akan diramal, kemudian regresi antara Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel eksogen dan Opini Audit sebagai variabel mediasi dengan IPM sebagai variabel endogen [23].

Kriteria dalam pengambilan kesimpulan yaitu: Opini Audit dinyatakan memediasi secara sempurna (*perfect mediation*) apabila setelah dimasukkan sebagai variabel mediasi kedalam regresi menyebabkan pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap IPM yang semula signifikan (tanpa mediasi) menjadi tidak signifikan (dengan mediasi). Opini Audit akan dinyatakan memediasi secara parsial (*partial mediation*) apabila setelah dimasukkan sebagai variabel mediasi kedalam regresi menyebabkan pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap IPM dari semula signifikan (tanpa mediasi) menjadi tetap signifikan (dengan mediasi).

Pengambilan 2 kesimpulan diatas menggunakan metode dilakukan dengan cara mencari nilai Z_{hitung} dengan rumus:

$$Z_{hitung} = \frac{a \cdot b}{\sqrt{a^2 \cdot SE_b^2 + b^2 \cdot SE_a^2}}$$

a = Koefisien regresi variabel eksogen dan variabel moderasi
 b = Koefisien regresi variabel moderasi dengan variabel endogen

SE = *Standard error* koefisien a dan b

Dari nilai Z_{hitung} , maka dapat ditentukan signifikansi melalui perhitungan menggunakan Microsoft Excel 2013 dengan rumus:

$$Sig = (1 - NORMSDIST(Z_{hitung\ positif})) \times 2$$

$$Sig = (NORMSDIST(Z_{hitung\ negatif})) \times 2$$

Untuk menghitung signifikansi hubungan tidak langsung antara variabel penjelas dengan variabel dependen melalui variabel mediasi, terdapat dua rumus yang berbeda tergantung apakah Z_{hitung} bernilai positif atau negatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Studi ini menggunakan sampel 100 kabupaten dan kota yang dipilih berdasarkan *random sampling* dari tahun 2014 hingga 2018, sehingga terdapat 500 data yang diobservasi. Berikut merupakan analisis statistik deskriptif, asumsi model regresi klasik, dan analisis jalur:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	Min	Mak	Rata	SD
Efektif.	2,4	361,1	120,2	41,5
Mandiri	0,5	92,9	11	12,1
Aktivit.	7,1	45,1	23,3	6,9
Opini	1	4	-	-
IPM	39,7	82,7	67,1	6,2

Berdasarkan dari tabel Statistik Deskriptif dapat dianalisis bahwa Rasio Efektivitas PAD (Efektif.) pemerintah daerah memiliki nilai minimum sebesar 2,4% yaitu kategori tidak efektif, nilai maksimum sebesar 361,1% yaitu kategori sangat efektif, dan rata-rata sebesar 120,2% yaitu kategori sangat efektif dengan nilai *Standard Deviation* (SD) sebesar 41,5. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata pemerintah daerah dapat merealisasikan PAD melampaui target PAD.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Mandiri) menunjukkan nilai minimum yaitu 0,5% yaitu kategori sangat kurang, nilai maksimum sebesar 92,9% yaitu kategori

sangat baik, dan rata-rata sebesar 11% yaitu kategori kurang dengan nilai SD sebesar 12,1. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata PAD berkontribusi sebesar 11% terhadap pendapatan yang diperoleh dari pemerintah pusat.

Nilai minimum untuk Rasio Aktivitas (Aktivit.) pemerintah daerah menunjukkan 7,1% dan nilai maksimum 45,1%. Rata-rata dan SD yaitu 23,3% dan 6,9. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata proporsi belanja pembangunan sebesar 23,3% dari total belanja pemerintah daerah.

Untuk variabel Opini Audit (Opini) menunjukkan nilai terendah yaitu 1 yang berarti dalam rentang waktu penelitian terdapat LKPD yang mendapatkan *Disclaimer Opinion* atau opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dari BPK. Hal ini harus menjadi perhatian mengingat APBD harus dikelola secara akuntabel yang diwakilkan oleh Opini Audit dari BPK.

IPM memiliki nilai minimum sebesar 39,7 yaitu IPM rendah, nilai maksimum sebesar 82,7 yaitu IPM sangat tinggi, dan rata-rata sebesar 67,1 yaitu IPM sedang dengan SD sebesar 6,2.

Data dalam penelitian ini telah lulus dari asumsi model regresi klasik. Uji normalitas melalui gambar P-Plot menunjukkan sebaran titik data searah dan mendekati garis diagonal, sehingga data penelitian terdistribusi normal. Uji Heteroskedastisitas melalui Uji Glejser seluruh variabel independen diperoleh nilai probabilitas lebih besar dari 5%. Dengan demikian, dapat disimpulkan tidak terjadi permasalahan pada uji heteroskedastisitas. Pada uji autokorelasi digunakan Run-Test, diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* diatas 5%, sehingga tidak terjadi masalah autokorelasi. Uji Multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* melampaui 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) masih dibawah 10. Alhasil, tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis dampak langsung dan tidak langsung dihubungan Kinerja Keuangan dari

Pemerintah Daerah dengan IPM. Pertama, penelitian ini melihat apakah Kinerja Keuangan dari Pemerintah Daerah dapat mempengaruhi hasil Opini Audit. Kedua, penelitian ini melakukan regresi untuk pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Opini Audit terhadap IPM dengan hasil regresi sebagai berikut:

Tabel 2. Uji Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Mediasi

Variabel	Koefisien	SE	Sig.
Efektif.	0,000	0,193	0,80
Mandiri	0,010	0,003	0,00 *
Aktivit.	-0,011	0,005	0,01 **
R ²	0,04		

* tingkat signifikansi pada 1%

** tingkat signifikansi pada 5%

Tabel 2 menunjukkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Aktivitas (Aktivit.) berpengaruh terhadap Opini Audit. Sebaliknya, Rasio Efektivitas PAD (Efektif.) tidak berpengaruh terhadap Opini Audit. Nilai R² yaitu 0,04 yang berarti bahwa kontribusi performa keuangan pemerintah daerah terhadap opini audit sebesar 0,04 atau 4%. Pada tabel 3 ditunjukkan hasil regresi pengaruh performa Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel independen dan Opini Audit sebagai variabel moderasi terhadap IPM sebagai variabel dependen:

Tabel 3. Uji Pengaruh Variabel Independen dan Moderasi Terhadap Variabel Dependen

Variabel	Koefisien	SE	Sig.
Efektif.	0,007	0,006	0,21
Mandiri	0,260	0,020	0,00 *
Aktivit.	-0,070	0,035	0,04 **
Opini	0,815	0,332	0,03 **
R ²	0,29		

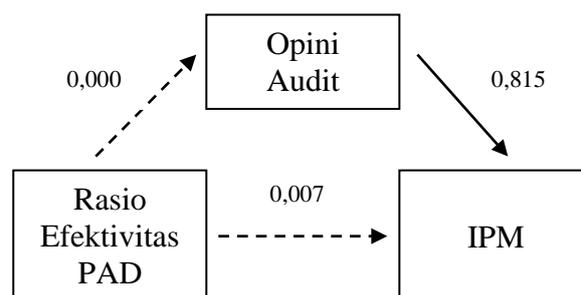
* tingkat signifikansi pada 1%

** tingkat signifikansi pada 5%

Tabel 3 memperlihatkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Mandiri),

dan Rasio Aktivitas (Aktivit.) dan Opini Audit (Opini) berpengaruh terhadap IPM. Namun, Rasio Efektivitas PAD (Efektif.) tidak berpengaruh terhadap IPM.

Nilai R² yaitu 0,29 yang berarti bahwa kontribusi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Opini Audit terhadap IPM sebesar 0,29 atau 29%. Dari dua hasil pengujian regresi diatas dapat dibuatkan bagan untuk masing-masing variabel langsung sebagai berikut:



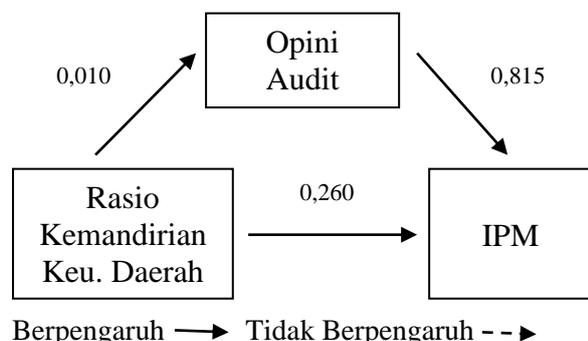
Berpengaruh → Tidak Berpengaruh - - →

Gambar 2. Analisis Jalur Rasio Efektivitas PAD, Opini Audit, dan IPM

Gambar 2 menunjukkan Rasio Efektivitas PAD tidak memiliki pengaruh langsung terhadap IPM. Bahkan nilai koefisien menunjukkan 0,000. Hasil tersebut linear dengan penelitian [12-14] dimana Rasio Efektivitas tidak berpengaruh terhadap IPM. Pengaruh yang tidak signifikan ini dikarenakan separuh dari kabupaten dan kota yang diteliti dengan IPM dibawah rata-rata statistik deskriptif menganggarkan target PAD sangat kecil daripada potensi penerimaan yang berdampak pada Rasio Efektivitas berada diatas 100%. Rasio Efektivitas PAD juga tidak memiliki pengaruh terhadap Opini Audit.

Meskipun hubungan langsung variabel independen dan variabel dependen tidak signifikan, pengujian hubungan tidak langsung tetap bisa dilakukan [24]. Untuk menguji pengaruh tidak langsung, penelitian ini menggunakan Z_{hitung} yang menunjukkan nilai koefisien 0,000 dengan tingkat signifikansi diatas 10%, sehingga tidak ada

pengaruh tidak langsung Rasio Efektivitas PAD terhadap IPM melalui Opini Audit. Oleh karena itu, Opini Audit tidak memediasi hubungan antara efektivitas PAD dan IPM. Realisasi PAD yang melebihi target penerimaan tidak mempengaruhi pelayanan publik dalam rangka peningkatan IPM.

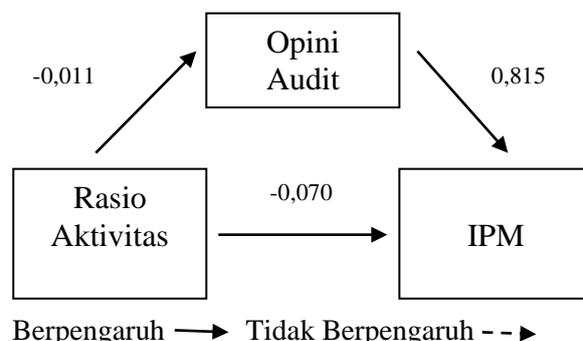


Gambar 3. Analisis Jalur Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Opini Audit, dan IPM

Berdasarkan gambar 3, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mempengaruhi positif IPM secara langsung pada tingkat signifikan 1%. Ini selaras dengan hasil penelitian [13] dan [15] yang menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berdampak positif langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dengan proksi IPM. Hasil ini tidak mendukung penelitian [12] yang menyebutkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap IPM karena dalam penelitian tersebut Kabupaten Aceh Timur belum mampu mengoptimalkan PAD untuk meningkatkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga memiliki efek untuk Opini Audit. Hasil ini menunjukkan bahwa daerah yang mampu mengoptimalkan PAD dan mandiri akan meningkatkan IPM dan meningkatkan Opini Audit karena pemerintahan dijalankan secara akuntabel.

Hasil pengujian Z_{hitung} menunjukkan nilai koefisien 0,008 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,04. Karena tingkat signifikan dibawah 5%, sehingga terdapat pengaruh positif tidak langsung Rasio Efektivitas PAD

terhadap IPM melalui Opini Audit. Oleh karena itu, Opini Audit dinyatakan memediasi secara parsial (*partial mediation*) karena Rasio Kemandirian Keuangan Daerah secara langsung mempengaruhi IPM dan tidak langsung mempengaruhi IPM melalui Opini Audit.



Gambar 4. Analisis Jalur Rasio Aktivitas, Opini Audit, dan IPM

Gambar 4 menunjukkan Rasio Aktivitas berpengaruh langsung negatif terhadap IPM pada taraf signifikansi 5%. Rasio Aktivitas berpengaruh negatif terhadap IPM dan signifikan pada level 5%. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian [15] dengan kesimpulan bahwa Rasio Aktivitas berpengaruh positif terhadap IPM di kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pengaruh negatif Rasio Aktivitas terhadap IPM secara langsung mengindikasikan bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran pembangunan agar efektif dan tepat sasaran, sehingga berdampak pada peningkatan IPM. Apalagi, anggaran tersebut diperuntukan untuk menyediakan infrastruktur yang memiliki efek pengganda yang besar bagi perekonomian lokal seperti menarik investor domestik dan asing, mempercepat arus pengiriman barang yang pastinya akan menekan biaya logistik, memajukan pariwisata daerah karena akses yang mudah dijangkau, serta potensi penyerapan tenaga kerja besar yang bisa memacu eskalasi tingkat kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya, apabila akuntabilitas dalam pembangunan infrasktrutur menurun, maka pengerjaan proyek dapat terhenti karena tidak

sesuai antara anggaran dan realisasinya atau inspeksi dari pihak-pihak terkait. Selain itu, ini dapat menimbulkan hasil pembangunan yang buruk seperti jalan yang mudah rusak, sehingga menghambat mobilitas tidak hanya masyarakat tetapi juga barang yang justru berdampak tidak baik bagi perekonomian daerah tersebut.

Uji Z_{hitung} memiliki nilai koefisien $-0,009$ dengan tingkat signifikansi $0,101$. Karena nilai signifikan di atas 10% , sehingga tidak terdapat pengaruh Rasio Aktivitas terhadap IPM melalui Opini Audit. Oleh karena itu, Opini Audit memediasi secara sempurna (*perfect mediation*).

Hasil audit atas LKPD mencerminkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus mendorong implementasi tata kelola yang baik seperti akuntabilitas keuangan daerah. Ini berarti anggaran untuk pembangunan daerah akan mendorong peningkatan IPM apabila dikelola secara akuntabel. Alhasil, desentralisasi fiskal dapat diimplementasikan secara efisien sesuai kebutuhan masing-masing daerah dan mempercepat kenaikan IPM. Selanjutnya, kepala daerah yang tidak sanggup dan cakap untuk mengelola keuangannya akan menurunkan kepercayaan masyarakat dan berimbas pada tingkat elektabilitas.

Untuk menyukseskan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah juga dituntut mandiri dalam mengelola dan menjalankan roda pemerintahannya. Apabila pemerintah daerah dapat mandiri dalam menjalankan pemerintahan daerah dengan baik, keberhasilan tersebut berdampak pada kenaikan perekonomian daerah, dan berdampak pada peningkatan kualitas manusia atau masyarakat di daerah tersebut. Dengan demikian, IPM di daerah tersebut juga meningkat.

Pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk memiliki kemandirian tinggi serta memprioritaskan anggaran pembangunan dalam APBD, tetapi juga disertai dengan

pengawasan audit yang baik agar mampu memberikan pelayanan publik lebih baik. Implikasi dari penelitian ini adalah semakin mandiri sebuah daerah dalam mengelola daerahnya, semakin mendorong percepatan peningkatan angka IPM.

4. Kesimpulan

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Aktivitas mempunyai pengaruh langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rasio Efektivitas PAD tidak mempunyai efek langsung terhadap IPM. Opini Audit tidak memediasi hubungan tidak langsung antara Rasio Efektivitas PAD dan IPM. Opini Audit memediasi secara parsial pengaruh tidak langsung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap IPM. Opini Audit memediasi sempurna pengaruh tidak langsung Rasio Aktivitas terhadap IPM. IPM adalah salah satu indikator penting bagi pemerintah daerah dalam usahanya untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah harus memaksimalkan potensi daerah untuk menghasilkan PAD, sehingga mendorong kemandirian daerah dan meningkatkan IPM. Selain itu, pemerintah daerah harus menganalisis anggaran pembangunan agar lebih tepat sasaran dan bisa meningkatkan IPM. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah juga harus diimbangi dengan Opini Audit agar pengelolaan keuangan menjadi akuntabel dan transparan, sehingga meningkatkan IPM.

Dari tiga variabel proksi kinerja keuangan dapat menjelaskan keterkaitannya dengan IPM pada tingkat 29% , artinya masih ada 71% variabel lain yang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap IPM. Penelitian berikut diharapkan dapat mengeksplorasi lebih dalam variabel lain yang memiliki andil besar dalam peningkatan IPM. Penelitian ini juga belum mempertimbangkan indikator-indikator penting penyusun IPM diantaranya adalah kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang mumpuni, pendidikan yang maju, dan kehidupan yang lebih baik serta layak. Penelitian selanjutnya diharapkan

menambah variabel rasio keuangan pemerintah daerah lainnya dan menganalisis pengaruhnya terhadap IPM, khususnya pada saat perekonomian nasional terjadi gejolak dan mengalami tekanan misalnya seperti krisis ekonomi, terdepresiasinya Rupiah, dan pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19), yang berpotensi besar menurunkan IPM.

Studi ini memiliki implikasi tidak hanya memperkaya pengembangan ilmu akuntansi sektor publik secara teori tetapi juga secara praktisi yaitu mendukung penerapan praktik akuntabilitas bagi pemerintah daerah yang mempengaruhi IPM. Bagi investor, penelitian dapat menjadi acuan dalam mempertimbangkan penanaman modal bahwa menjadi lebih efektif jika dilakukan di daerah yang mampu mengatur keuangannya khususnya anggaran pembangunan dengan baik karena infrastruktur dibangun secara cermat dan berkualitas untuk mempercepat aksesibilitas.

Daftar Rujukan

- [1] M. A. Arham, "Desentralisasi Fiskal Dan Perubahan Struktur Ekonomi: Studi Perbandingan Kawasan Sulawesi Dan Jawa," *EKUITAS (Jurnal Ekon. dan Keuangan)*, vol. 18, no. 4, pp. 431–451, 2014, doi: [10.24034/j25485024.y2014.v18.i4.2155](https://doi.org/10.24034/j25485024.y2014.v18.i4.2155)
- [2] I. Candra Yunita Sari and N. Supadmi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia," *E-Jurnal Akunt.*, vol. 15, no. 3, pp. 2409–2438, 2016. ISSN: 2302-8556
- [3] Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2014 Metode Baru*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015. ISSN: 2086-2369
- [4] Badan Pusat Statistik, "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2019," 2020. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/17/1670/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-pada-tahun-2019-mencapai-71-92.html>.
- [5] N. Priyono, W. Juliprijanto, and S. Setyawan, "Studi Empiris: Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia," *J. Rak (Riset Akutansi)*, vol. 4, no. 2, pp. 13–25, 2019, doi: [10.31002/rak.v4i2.1951](https://doi.org/10.31002/rak.v4i2.1951)
- [6] B. Saputra, "Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Korupsi Di Indonesia," *Borneo Adm.*, vol. 8, no. 3, pp. 251–260, 2012, doi: [10.24258/jba.v8i3.92](https://doi.org/10.24258/jba.v8i3.92)
- [7] T. W. W. Utomo, "Dekonsentrasi & Desentralisasi Dalam Diskursus Negara Kesatuan & Negara Federal," *J. Ilmu Adm.*, vol. IX, no. 1, pp. 34–44, 2012, doi: [10.31113/jia.v9i1.254](https://doi.org/10.31113/jia.v9i1.254)
- [8] W. E. Oates, "Fiscal Decentralization and Economic Development," *Natl. Tax J.*, vol. 46, no. 2, pp. 237–43, 1993.
- [9] Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, 3rd ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017. ISBN: 9789793532240
- [10] Nurhayati, "Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu," *J. Ilm. Cano Ekon.*, vol. 4, no. 33, pp. 55–66, 2015. ISSN: 2301-9506
- [11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- [12] Y. Astuti, Krisniawati, M. Zulkarnain, and A. Maifizar, "Pengukuran Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Aceh Timur," *Community Pengawas Din. Sos.*, vol. 5, no. 2, pp. 157–167, 2019, doi: [10.35308/jcpds.v5i2.1522](https://doi.org/10.35308/jcpds.v5i2.1522)
- [13] Khairudin, Aminah, and A. P. Redaputri, "Pentingnya kinerja keuangan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan

- masyarakat di Indonesia,” vol. 17, no. 1, pp. 148–151, 2020, doi: [10.29264/jakt.v17i1.7336](https://doi.org/10.29264/jakt.v17i1.7336)
- [14] E. M. Harliyani and Haryadi, “Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi,” *J. Perspekt. Pembiayaan dan Pembang. Drh.*, vol. 3, no. 3 SE-, pp. 129–140, 2016, doi: [10.22437/ppd.v3i3.3514](https://doi.org/10.22437/ppd.v3i3.3514)
- [15] N. A. C. Putry and R. Badrudin, “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Opini Audit Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *J. Ris. Manaj. dan Bisnis*, vol. 12, no. 1, pp. 25–34, 2016.
- [16] Musahadah and R. Amarullah, “Sebuah Paradoks: Opini WTP dan Kesejahteraan Rakyat,” *J. Borneo Adm.*, vol. 14, no. 1, pp. 53–68, 2018, doi: [10.24258/jba.v14i2.335](https://doi.org/10.24258/jba.v14i2.335)
- [17] J. Surya and S. Suparno, “Pengaruh Peran Masyarakat Madani dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh),” *J. Ilm. Mhs. Ekon. Akunt.*, vol. 4, no. 2, pp. 259–269, Aug. 2019, doi: [10.24815/jimeka.v4i2.12236](https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i2.12236)
- [18] N. A. Wulandari and S. Sulardi, “Pengaruh Karakteristik Daerah, Temuan, dan Opini Audit (Studi Empiris Pada Website Pemda di Indonesia),” *Akunt. Dewantara*, vol. 2, no. 1, pp. 69–82, 2018, doi: [10.29230/ad.v2i1.2477](https://doi.org/10.29230/ad.v2i1.2477)
- [19] N. M. Dwi Pradnyani and N. P. Sri Harta Mimba, “Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Realisasi PAD sebagai Pemediasi,” *E-Jurnal Akunt.*, vol. 30, no. 12, p. 3150, Dec. 2020, doi: [10.24843/EJA.2020.v30.i12.p12](https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i12.p12)
- [20] Y. Afiatin, E. Ersyi, and B. Rachmat, “Corporate Social Responsibility dan Debt Ratio sebagai Determinan Harga Saham,” *J. Ris. dan Apl. Akunt. dan Manaj.*, vol. 4, no. 2, pp. 239–245, 2020, doi: [10.33795/jraam.v4i2.011](https://doi.org/10.33795/jraam.v4i2.011)
- [21] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung, 2018. ISBN: 978-602-289-373-8
- [22] I. Heryanto and T. Triwibowo, *Path Analysis Menggunakan SPSS dan Excel*. Bandung: Penerbit Informatika, 2018. ISBN: 978-602-6232-64-9
- [23] Suliyanto, *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011. ISBN: 978-979-29-2620-0
- [24] D. MacKinnon, *Introduction to Statistical Mediation Analysis*. New York: Routledge, 2012. doi: [10.4324/9780203809556](https://doi.org/10.4324/9780203809556)